

Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa

Listiana Padagi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat E-mail : listianapadagi@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekomendasi bagaimana untuk mewujudkan suatu koordinasi yang efektif dalam lingkup Pemerintahan Desa khususnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Judul penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Batu Tajam bahwa konflik antara Pemerintah Desa dan BPD, ketidakcocokan serta ketidaksinkronan pendapat dalam proses penyusunan hingga penetapan APBDes dan peraturan Desa.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teori koordinasi "Tripathi dan Reddy", dijelaskan bahwa ada 4 faktor penting untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif. Empat faktor ini yaitu : komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas dan perumusan wewenang dan tanggung jawab, apabila 4 faktor ini dapat terealisasi dengan baik maka hasil yang diharapkan yakni suatu koordinasi yang efektif dapat terwujud. Lokasi penelitian di Desa Batu Tajam. Subyek penelitian adalah Pemerintah Desa beserta Perangkat dan Ketua BPD serta anggota.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bersama hingga berujung konflik antara kedua belah pihak. Untuk itu rekomendasi serta solusi yang diberikan untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif dan hubungan yang harmonis adalah 4 faktor dari "Tripathi dan Reddy" yakni mengintensifkan komunikasi, peran pimpinan, kontinuitas serta memberikan penjelasan akan pentingnya memahami akan tugas dan fungsi masing-masing.

Kata Kunci : Koordinasi dan kewenangan otonomi desa

Abstract

This study is intended to produce a recommendation how to realize an effective coordination within the Village Government in particular coordination between the village government and the BPD in the village of Stone Tumbles Sharply Titi Ketapang District. The title of this thesis based on the issues raised in the village of Batu Sharp that the conflict between the village and the BPD, discrepancies and discrepancies of opinion in the process of drafting regulations to determining APBDes and village.

This study used a qualitative research model by using the theory of coordination "Tripathi and Reddy", explained that there are four important factors to achieve an effective coordination. The four factors are: communication, leadership, continuity and formulation of authority and responsibility, if the four factors can be realized with better then expected result that an effective coordination can be realized. The research location in the village of Batu Sharp. The subjects were the village government and its Devices and Chairman and members of the BPD.

The conclusion of this research is the lack of coordination between the village and the BPD in the tasks and functions together to lead to conflict between the two sides. For that recommendation as well as the solutions given to achieve an effective coordination and harmonious relationships are 4 factors of "Tripathi and Reddy" intensify the communication, the role of leadership, continuity and provide an explanation of the importance of understanding the duty and function of each.

Keywords : coordination and authority of village autonomy

A. PENDAHULUAN

1. Indikasi Permasalahan

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal-usul setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dengan adanya dua lembaga dalam pemerintahan desa membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi di tingkat desa, dengan menghadirkan BPD sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintah desa. Sebagai bentuk pemerintahan lokal yang memiliki perangkat pemerintah desa (eksekutif) dan BPD sebagai perangkat legislatif desa mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul BPD kemudian rancangan peraturan desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Oleh karena ada konsekuensi dari fungsi dan wewenang bersama antara pemerintah desa dan BPD dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa maka diperlukan

adanya suatu koordinasi pemerintahan. Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mencapai kesatuan gerak untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kewenangan otonomi desa dalam membuat peraturan desa. Kebutuhan akan koordinasi timbul apabila satu orang atau kelompok bertanggungjawab atas kesempurnaan tugas. Dari uraian latar belakang penelitian, maka penelitian ini penulis fokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi desa.

2. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi desa?

3. Tujuan

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara pemerintah desa dan BPD dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi desa di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran yang baik khususnya masalah koordinasi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyelenggaraan kewenangan otonomi desa. Serta diharapkan hasil penelitian ini diharapkan membawa dampak yang lebih baik bagi instansi pemerintah, khususnya di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang agar urusan pemerintahan desa dapat tercapai.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Koordinasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang efektif Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:40), dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program untuk waktu yang akan datang.

Komponen-komponen dasar komunikasi ada 5 (Arni Muhammad, 2011:17) yaitu :

- 1) Pengirim pesan
- 2) Pesan
- 3) Saluran
- 4) Penerima pesan
- 5) Umpan balik

Pengirim pesan adalah individu atau orang yang menyampaikan pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan berasal dari otak si pengirim pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima pesan. Pesan dibagi menjadi dua yaitu pesan verbal maupun nonverbal. Pesan secara verbal dapat secara tertulis berupa surat, buku, majalah, memo sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan, tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dsb. Pesan yang nonverbal dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka dan nada suara. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim kepada si penerima pesan. Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Umpan balik adalah respon

terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang harus ditunjang oleh komponen-komponen pendukung yang telah dijelaskan di atas, komunikasi yang efektif akan tercipta jika ada keselarasan dari 5 komponen di atas, baik dari si pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan hingga pada umpan balik (*feedback*). Melalui komunikasi yang efektif, tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan organisasi dapat dihindarkan sehingga dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Selain memperhatikan komponen dasar, komunikasi yang efektif perlu memperhatikan 3 indikator (Arni Muhammad, 2011:19) yakni :

- 1) Intensitas komunikasi
- 2) Media/saluran komunikasi
- 3) Dimensi komunikasi

Intensitas komunikasi berhubungan dengan kuantitas komunikasi yang dilakukan, semakin sering melakukan komunikasi maka semakin efektif komunikasi yang dilakukan. Sedangkan media komunikasi berhubungan dengan saluran yang digunakan dalam komunikasi, komunikasi secara langsung atau menggunakan media seperti telepon seluler, radio, dsb. Lain halnya dengan dimensi komunikasi, yang berkenaan dengan arus pesan yang mengalir, di mana komunikasi dibagi menjadi dua yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Pada komunikasi satu arah, pesan hanya mengalir dari pengirim pesan sedangkan komunikasi dua arah pesan mengalir baik dari pengirim maupun penerima.

b. Kepemimpinan

Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang efektif menurut Keith Davis (dalam Sutrisno, 2010: 90) harus memiliki 4 hal, yang meliputi:

- 1) Tingkat pendidikan, seharusnya seorang pemimpin harus mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari bawahannya.
- 2) Kematangan jiwa sosial, seorang pemimpin biasanya memiliki perasaan/jiwa yang cukup matang dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar terhadap bawahannya.
- 3) Motivasi terhadap diri dan hasil, seorang pemimpin senantiasa ingin membereskan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Menjalin hubungan kerja manusiawi, seorang pemimpin harus dapat bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan bawahannya.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu, berkelanjutan dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap akhir yaitu evaluasi. Pelaksanaan koordinasi yang kontinu perlu memperhatikan 3 indikator, Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:40), yaitu:

- 1) Koordinasi pada tahap awal perencanaan,
- 2) Koordinasi pada tahap pelaksanaan,
- 3) Koordinasi pada tahap evaluasi.

Oleh karena koordinasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dipahami perlu ada keberlanjutan tidak berhenti pada satu titik saja. Perlu adanya konsultasi

bersama pada tahap awal perencanaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, koordinasi harus berlangsung selama bagian atau unit di dalam suatu organisasi tak terkecuali organisasi pemerintahan desa melaksanakan fungsinya.

d. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, G.R Terry (dalam Siagian, 1989:34). Wewenang juga diartikan sejumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Sedangkan tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama dengan wewenang yang dimiliki. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada orang/pihak lain. Perumusan wewenang dan tanggung jawab ini dapat dilihat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit atau bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara unit atau bagian yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sugiyono (2007:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan obyek dan subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek yang diteliti (Sukardi, 2009:157). Dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penunjukan informan secara sengaja di mana informan tersebut dirasa mengetahui tentang apa yang menjadi obyek penelitian kita (Bungin, 2010:53). Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa sebagai unsur pimpinan Pemerintah Desa, sekretaris desa, ketua BPD serta salah satu anggota BPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005:91) yaitu dengan reduksi data, data display dan verifikasi.

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MENYELENGGARAKAN KEWENANGAN OTONOMI DESA

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik, oleh karena itu untuk mencapai komunikasi yang efektif perlu memperhatikan intensitas komunikasi, media/saluran komunikasi serta dimensi komunikasi. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa Batu Tajam sangat jarang untuk melakukan komunikasi, hal ini disebabkan karena kesibukan di luar jabatan lebih penting dibandingkan wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya dalam pemerintahan Desa Batu Tajam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan terkait, dapat dipahami bahwa dari sudut intensitas komunikasi, komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan BPD sangat jarang. Minimnya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan BPD disebabkan karena adanya kesibukan atau pekerjaan lain di luar jabatan dalam organisasi Pemerintahan Desa Batu Tajam yang dirasa lebih penting dibandingkan tugas dan wewenangnya. Dari pembahasan mengenai faktor komunikasi sebagai syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif jelas sangat berpengaruh, komunikasi yang efektif kunci dari koordinasi yang efektif pula. Faktor komunikasi ini dilihat lagi pada 3 indikator yakni intensitas komunikasi, media komunikasi serta dimensi komunikasi. Apabila ketiga indikator komunikasi ini sudah sesuai dengan yang dijabarkan pada kajian pustaka maka komunikasi yang efektif dapat terwujud.

Pada hakikatnya koordinasi ada di tangan pimpinan oleh karena itu faktor kepemimpinan memegang peranan penting dalam mempengaruhi pelaksanaan koordinasi. Untuk melihat kepemimpinan itu perlu dilihat dari pendidikan serta intelegensinya, kematangan jiwa sosial, motivasi terhadap diri sendiri dan hasil serta dapat menjalin hubungan kerja yang baik dengan partner maupun bawahannya. Dari hasil pembahasan mengenai kepemimpinan dapat dilihat bahwa pola kepemimpinan dari Kepala Desa cenderung kurang tegas dan kurang dapat mengkoordinir bawahan dengan baik hal ini disebabkan karena sikap toleransi Kepala Desa terhadap bawahan, sikap toleransi ini mengakibatkan bawahan kurang dapat menghargai Kepala Desa sebagai unsur pimpinan Pemerintah Desa. Oleh karena itu

kepemimpinan dari Kepala Desa menjadi kurang efektif, sehingga berdampak pula pada koordinasi yang dilakukan menjadi kurang efektif pula.

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu atau berkesinambungan, tidak hanya terhenti pada saat tahap awal perencanaan saja dan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu koordinasi harus dilakukan terus-menerus agar pelaksanaan koordinasi yang efektif yang hendak dicapai dapat terwujud. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas belaka, sangat jarang melakukan koordinasi jika ada pun hanya sebatas pada tahap awal saja yakni tahap perencanaan. Untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif diperlukan proses yang berkesinambungan atau kontinu, suatu pelaksanaan koordinasi yang efektif tidak akan didapat hanya sebatas pada tahap awal atau tahap perencanaan saja harus dilanjutkan hingga tahap evaluasi.

Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu organisasi. Dengan ada kekuasaan resmi atau dasar bertindak di dalam suatu jabatan seseorang secara sah memiliki kewenangan dalam bertindak, wewenang yang jelas dapat membantu mengurangi pertentangan antar unit atau bagian. Sedangkan tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang, oleh karena itu ada keterkaitan satu sama lain

antara wewenang dan tanggung jawab. Perumusan wewenang dan tanggung jawab ini dapat dilihat pada tugas, fungsi serta wewenang masing-masing jabatan. Tujuan dari perumusan wewenang dan tanggung jawab adalah untuk mengetahui kedudukan suatu jabatan, ruang lingkup kerja unit organisasi, pertanggungjawaban dari suatu jabatan serta kewenangan dan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari suatu jabatan.

Di pemerintahan Desa Batu Tajam belum terlihat pemahaman aparatur desa akan wewenang dan tanggung jawab dari jabatan yang ia duduki. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa aparatur desa dapat dilihat bahwa sebagian besar dari aparat desa masih merasa kurang paham akan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti halnya kewenangan otonomi desa, aparat desa harus mengetahui akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan desa jika dari aparat desanya kurang paham akan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di dalam organisasi Pemerintahan Desa Batu Tajam.

Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan di dalam suatu organisasi, tak terkecuali pada organisasi pemerintahan desa. Koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD merupakan koordinasi fungsional atau koordinasi horisontal, di mana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan memiliki kedudukan yang sejajar antara pihak Pemerintah Desa (eksekutif) dan BPD (legislatif). Menurut tugas dan fungsinya

keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.

Kebutuhan akan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD timbul karena adanya tugas dan fungsi yang sama yaitu dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa dan APBDes. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa Batu Tajam dan BPD belum optimal karena dipengaruhi beberapa faktor yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Di mana komunikasi mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, komunikasi yang efektif adalah kunci dari pelaksanaan koordinasi yang efektif, fakta di lapangan menunjukkan komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan BPD lebih kepada komunikasi tidak langsung atau komunikasi yang menggunakan media. Sulit untuk melakukan koordinasi apabila komunikasi yang dipilih menggunakan media atau alat perantara karena arus informasi yang dihasilkan dapat menyebabkan distorsi pesan. Lain halnya dengan faktor kepemimpinan, dalam kehidupan organisasi tak terkecuali organisasi pemerintahan desa, kepemimpinan memegang peranan penting di dalam usaha mencapai suatu koordinasi. Karena pada hakikatnya, tanggung jawab koordinasi ada di tangan suatu pimpinan atau koordinator. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pola kepemimpinan Kepala Desa masih kurang tegas, toleransi yang berlebihan kepada partner dan bawahan menjadi pemicu kurang efektifnya pola kepemimpinan dari pimpinan Pemerintah Desa. Dilihat dari sudut pandang kontinuitas, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan BPD masih sebatas pada tahap awal perencanaan saja, padahal suatu pelaksanaan yang efektif itu adalah koordinasi yang kontinu

atau berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, dapat dipahami bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa Batu Tajam dan BPD masih kurang efektif.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

1. Simpulan

- a. Ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, faktor tersebut adalah komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas serta perumusan wewenang dan tanggung jawab. Belum optimalnya keempat faktor diimplementasikan berdampak pula terhadap pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Batu Tajam dan BPD.
- b. kurangnya kesepahaman pendapat antara Pemerintah Desa dan BPD, pola hubungan yang kurang harmonis antara kedua belah pihak serta kesibukan di luar jabatan masing-masing berdampak pada terhambatnya proses penyusunan hingga penetapan peraturan desa. Untuk itu dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi desa, perlu diadakan suatu koordinasi.

2. Keterbatasan Studi

- a. Selain dari 4 faktor di atas, penulis menemukan faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa Batu Tajam dan BPD yaitu faktor finansial insentif.

- b. Penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan dari peneliti lain demi penyempurnaan penelitian yang serupa ke depannya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penelitian.
2. Kepada Universitas Tanjungpura melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya Pemerintahan Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang yang digunakan penulis sebagai lokasi penelitian.

F. REFERENSI

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Handyaningrat, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masaung.

Moekijat. 1994. *Koordinasi Sebagai Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad, Arni. 2011. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : Listiana Padagi

NIM / Periode lulus : E42008023 / 2012

Email address/HP : listianapadagi@ymail.com / 085245580609

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENUNJANG
KEWENANGAN OTONOMI DESA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain:

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal. 11/1./2013...

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013



Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

(Listiana Padagi)